BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang besar yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya. Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu tujuannya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas semua komponen bangsa. Masyarakat yang sejahtera dan cerdas merupakan dambaan semua negara. Apabila masyarakat sejahtera, kehidupan di segala bidang akan baik. Bangsa Indonesia tentu akan lebih maju apabila masyarakatnya cerdas.¹ Salah satu modal untuk memajukan Negara Republik Indonesia ini adalah dengan memastikan sumber daya manusia yang memadai dan perlu dikembangkan serta diperhatikan kesehatannya.

Upaya meningkatkan sumber daya manusia perlu dilakukan dengan pembangunan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka

¹ *Plengdut*, Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, <https://www.plengdut.com/tujuan-negara-kesatuan-republik/246/>, diakses tanggal 9 September 2018.

mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, ada obat-obatan atau zat yang memegang peranan penting, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat.² Narkotika juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.³ Namun, apabila Narkotika digunakan secara berlebihan atau tidak sesuai dengan aturannya, maka dapat menyebabkan dampak yang tidak baik bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka itu, diperlukan peraturan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dampak penyalahgunaan Narkotika secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua). Pertama, dampak khusus penyalahgunaan Narkotika. Kedua, dampak umum penyalahgunaan narkotika. Dampak kedua ini masih dibagi lagi menjadi dampak terhadap individu, dampak terhadap orang tua dan keluarga serta dampak terhadap masyarakat dan bangsa. Pertama, perihal dampak khusus penyalahgunaan narkotika, dalam hal ini misalnya ganja dan heroin. Dampak fisik akibat penggunaan ganja antara lain denyut nadi meningkat, mata merah, mulut kering, mengantuk, radang paru-paru, sesak nafas, menimbulkan penyakit kanker. Dampak psikis akibat penggunaan ganja

² Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³ Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

antara lain perasaan tertekan, agresif, rasa gembira berlebihan (*euphoria*), halusinasi, berkurangnya daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir serta bersosialisasi. Sedangkan dampak fisik penggunaan heroin antara lain pupil mata menyempit, lesu, mengantuk, mual, muntah, diare, jantung berdebar, nyeri otot, ginjal dan hati rusak. Dampak psikis akibat penggunaan heroin antara lain menimbulkan *euphoria*, apatis, selalu curiga, agresif, mudah marah, gelisah luar biasa, konsentrasi berpikir dan kemampuan bersosialisasi menurun.

Kedua, perihal dampak umum penyalahgunaan narkotika. Terhadap individu, dampak tersebut antara lain menimbulkan gangguan terhadap kesehatan fisik seperti keracunan, gejala putus obat yang biasa disebut “sakaw”, kerusakan otak, jantung, paru-paru, hati, ginjal, organ reproduksi sampai kematian yang sia-sia. Menimbulkan gangguan terhadap kesehatan psikis seperti gelisah, cemas, takut, curiga, dan waspada berlebihan, paranoid, depresi, waham kebesaran, *euphoria*, agresif, gangguan daya ingat.⁴ Penyalahgunaan Narkotika juga dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap.⁵

⁴ Dani Krisnawati, Eddy O. S. Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, Supriyadi, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Cetakan I, Penerbit Pena Pundi Aksara, Jakarta, hlm. 88-90

⁵ *Ibid.*

Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya disebut “*abuse*”, yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya dan dapat juga diartikan salah pakai, yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Orang yang menyalahgunakan narkotika dapat menimbulkan rasa ketagihan, kecanduan terhadap obat atau zat yang termasuk dalam narkotika sehingga ia akan selalu mencari obat atau zat tersebut dan akhirnya akan menjadi budak dari obat atau zat tersebut. Rasa kecanduan dan ketagihan terhadap obat atau zat itu dipengaruhi oleh dosis pemakaian yang terus menerus meningkat. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa, narkotika adalah obat dan atau zat-zat yang keras dan berbahaya. Narkotika bekerja sangat aktif yang mempunyai pengaruh terhadap otak dan susun syaraf sentral, serta Jantung dan organ vital lainnya.⁶

Penyalahgunaan narkotika dapat berakibat buruk pada tubuh, kejiwaan, dan kehidupan sosial pemakainya, maupun keluarga dan masyarakat umum sekitarnya. Bahaya-bahaya penyalahgunaan narkotika dapat mengancam fisik atau jasmani seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan lain-lain, serta dapat mengancam psikologis atau kejiwaan seperti depresi, paranoid (penuh curiga dan khawatir), percobaan bunuh diri, dan masih banyak lagi. Dorongan atau kebutuhan untuk memakai narkotika terus menerus, sangat nyata pada pemakai yang sudah kecanduan. Beberapa pemakai ada yang memang sudah mempunyai masalah kejiwaan sebelum mulai menggunakan obat/zat yang terkandung dalam narkotika, dan menggunakan narkotika

⁶ H. M. Ridha Masoef, 1986 , *Narkotika Bahaya & Penanggulangannya*, Penerbit Karisma Indonesia, Jakarta, hlm 9-10.

merupakan cara yang dipilihnya untuk mengatasinya. Sering pemakai tidak menyadari rasa nyeri dan rasa depresi yang berlebihan atau perubahan atau gangguan mental dan perilaku yang dialaminya karena efek analgesic obat yang dipakainya, sehingga pemakaian terus berlanjut ke tingkat risiko yang lebih parah.⁷ Apabila pecandu sudah tergantung dengan obat atau zat terlarang tersebut dan sudah mengalami gangguan atau perubahan mental dan perilaku maka dapat disebut dengan *Dual Diagnosis* dan dapat mendorong pecandu melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. *Dual Diagnosis* sendiri tidak bisa dilihat begitu saja atau dinilai begitu saja oleh orang awam, perlu adanya pemeriksaan dari ahli seperti psikiater, psikolog, atau dokter ahli kejiwaan.

Perubahan atau gangguan mental dan perilaku (*Dual Diagnosis*) dan penyalahgunaan obat atau zat yang mengandung narkotika dapat terjadi bersamaan atau kedua gangguan dapat terjadi masing-masing. Gangguan jiwa berat bisa mengancam kehidupan seorang pengguna narkotika. Ketua Tim Koordinator Assesment Badan Narkotika Nasional (BNN) pusat Dr Benny di Palembang, mengatakan pecandu Narkotika terancam menderita gangguan jiwa berat atau skizofrenia yang apabila jika sudah menyerang maka hampir dipastikan tidak bisa disembuhkan. Benny mengatakan, gangguan jiwa berat disebabkan kelainan secara kimiawi pada otak yang pada akhirnya mengganggu fungsi sistemik dan impuls syaraf otak. Kondisi ini

⁷ *Super User*, NARKOBA ATAU NAPZA DAN DAMPAK PENYALAHGUNAANYA, <http://satubuminews.com/index.php/2015-08-06-17-52-44/narkoba-atau-nafza-dan-dampak-penyalahgunaannya>, diakses tanggal 11 September 2018.

mengakibatkan kegagalan fungsi otak dalam mengolah informasi dari dan ke panca indera, sehingga timbul proyeksi yang tidak seharusnya, seperti halusinasi baik secara visual, pendengaran atau proyeksi ingatan masa lalu. Kemudian, tingkah laku abnormal dan berdasarkan insting, delusi adalah keyakinan bahwa seseorang seolah-olah mengalami sesuatu (alam khayal), komunikasi kacau, suka menyendiri dan tidak dapat dikontrol.⁸ Hal-hal seperti ini dapat mendorong seseorang yang sudah mengalami *Dual Diagnosis* dapat melakukan tindak pidana Narkotika di bawah pengaruh obat atau zat.

Dalam hubungan ini dunia internasional telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi Narkotika salah satunya melalui *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and psychotropic substances 1988* (Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan psikotropika 1988). Konvensi ini membuka kesempatan bagi negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk melakukan kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, baik secara bilateral maupun multilateral.⁹ Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Indonesia sudah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang produksi, peredaran, ekspor, impor, pengangkutan, penggunaan, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan

⁸ *Newswire*, Pecandu Narkoba Berisiko Alami Gangguan Jiwa Berat dan Tak Bisa Disembuhkan, <http://lifestyle.bisnis.com/read/20160905/106/581361/pecandu-narkoba-berisiko-alami-gangguan-jiwa-berat-dan-tak-bisa-disembuhkan>, diakses tanggal 11 September 2009.

⁹ Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

narkotika. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain ialah Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika terdapat juga ketentuan pidana bagi seseorang yang menyalahgunakan narkotika maupun psikotropika. Apabila seseorang yang menyalahgunakan zat atau obat yang terkandung dalam narkotika melakukan tindak pidana narkotika tentu saja dapat dipenjarakan berdasarkan pasal-pasal yang ada di Undang-undang nomor 35 tahun 2009, untuk pelaku tindak pidana Narkotika yang mengalami gangguan jiwa diberikan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal”

Dapat dikatakan orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dipidana penjara, tetapi bagaimana dengan seseorang yang mengalami *Dual Diagnosis* atau mengalami perubahan atau gangguan mental dan perilaku dan ketergantungan obat atau zat yang terkandung dalam narkotika secara bersamaan tersebut melakukan tindak pidana kejahatan, selain melihat peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas tentu pengetahuan hakim sangat dibutuhkan untuk memutus perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang mengalami *Dual Diagnosis* tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan penulisan skripsi yang diberi judul “**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA NARKOTIKA TERHADAP PELAKU YANG MENGALAMI *DUAL DIAGNOSIS***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika terhadap pelaku yang mengalami *Dual Diagnosis*?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika bagi pelaku yang mengalami perubahan atau gangguan mental dan perilaku (*Dual Diagnosis*).

2. Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi apa yang sesuai digunakan untuk pelaku tindak pidana Narkotika yang

mengalami perubahan atau gangguan mental dan perilaku (*Dual Diagnosis*) serta apakah dapat Hakim dapat menggunakan unsur pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana pada khususnya dibidang pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana Narkotika yang mengalami perubahan atau gangguan mental dan perilaku (*Dual Diagnosis*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan agar menjadi masukan atau inspirasi kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika terhadap pelaku yang mengalami perubahan atau gangguan mental dan perilaku (*Dual Diagnosis*).

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat mendapatkan pengertian dan pengetahuan yang cukup, serta dapat menjadi sumber informasi mengenai pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan pertimbangan

hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang mengalami perubahan atau gangguan mental dan perilaku (*Dual Diagnosis*).

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dimaksudkan penulis untuk dapat menambah pengetahuan dibidang hokum, khususnya tentang pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku yang mengalami perubahan atau gangguan mental dan perilaku (*Dual Diagnosis*).

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Pidana Narkotika terhadap Pelaku yang mengalami *Dual Diagnosis* (Gangguan/Perubahan mental dan perilaku dan Ketergantungan Zat Psikoaktif) bukan duplikasi atau plagiasi skripsi yang ada tetapi merupakan hasil karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang mempunyai kemiripan, yaitu:

1. Astri Marintan Hutasoit, NPM 120511101, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2015. Menulis skripsi tentang “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Rumusan masalahnya adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitiannya adalah Dasar pertimbangan hakim dalam putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta, hakim menggunakan ketentuan, antara lain :

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung.
- b. Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba terutama pada Pasal 127 Jo pasal 103.
- c. Hakim juga melihat adanya fakta lain sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yaitu hasil asesmen dan analisis tim asesmen terpadu sebagai rekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang.

Perbedaan dengan penulisan ini adalah Astri Marintan Hutasoit menekankan pada dasar pertimbangan Hakim dalam putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penulis menekankan pada pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkoba yang mengalami *Dual Diagnosis*.

2. Dhemas Dewa Prasetya, NPM 100510386, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2017. Menulis skripsi tentang "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku dan Korban Penyalahgunaan Narkoba".

Rumusan masalahnya adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku penyalahgunaan narkotika dan Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika.

Hasil penelitiannya adalah bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada pelaku dan korban dalam tindak pidana narkotika adalah :

- a. Melindungi hak-hak pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika selama menjalani persidangan.
- b. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan memberikan kuasa hukum untuk mendampingi pelaku dan korban untuk menjalani persidangan.
- c. Rehabilitasi medis dan sosial.

Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku penyalahgunaan narkotika aparat hukum masih mendapati banyak kendala kendala yang dihadapi antara lain adalah :

- a. Hambatan dari dalam (intern)
 - 1) Pelaku dan korban tidak mau direhabilitasi karena kurangnya pemahaman akan rehabilitasi, sehingga pelaku dan korban memiliki ketakutan akan tindakan rehabilitasi.
 - 2) Apabila pelaku dan korban masih anak-anak, bahwa anak dalam hal ini masih berada di bawah umur dan masih labil dalam berfikir, sehingga hakim di dalam melakukan pemeriksaan persidangan berupa pertanyaan-pertanyaan kepada si anak terkadang si anak

tidak konsisten dalam menjawab dan terkesan kebingungan, maka dari itu hakim dalam hal ini merasa kesulitan dalam menggali informasi tentang si anak.

b. Hambatan dari luar (ekstern)

1) Penasehat hukum yang mendampingi pelaku dan korban tidak kooperatif, diantaranya adalah sering tidak hadir didalam persidangan.

2) Didalam melakukan tindakan rehabilitasi tentunya memerlukan biaya, dan sebagian besar pelaku dan korban tidak dapat direhabilitasi oleh karna mereka tidak mempunyai biaya untuk membiayai rehabilitasi yang akan mereka jalani.

Perbedaan dengan penulisan ini adalah Dhemas Dewa Prasetya menekankan pada perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban penyalahgunaan narkoba, sedangkan penulis menekankan pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkoba yang mengalami *Dual Diagnosis*.

3. Barry Franky Siregar, NPM 080509986, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2016. Menulis skripsi tentang “Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Residivis Pengedar Narkoba di Kota Yogyakarta”.

Rumusan masalahnya adalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang hendak dikaji adalah Apakah

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis pengedar narkoba di kota Yogyakarta.

Hasil penelitiannya adalah Bahwa seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap seorang pengedar residivis dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi, kemudian profesionalisme, hukum pidana yang berdasarkan Pasal 1 KUHP, terdakwa, tuntutan masyarakat, individu, sikap perilaku yang apriori, sikap perilaku yang emosional, sikap arrogance power, dan terakhir moral, dalam hal menjatuhkan putusan terhadap seorang residivis, hakim kan menambahkan sepertiga dari masa hukuman yang dijatuhkan. Dalam hal menjatuhkan putusan terhadap seorang residivis hakim memiliki kendala yaitu ketidaktahuan seorang hakim terhadap terdakwa dimana apakah terdakwa tersebut sudah pernah dijatuhi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelumnya atau belum. Seorang penyidik berperan penting untuk membantu hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu dengan cara memasukkan putusan sebelumnya kedalam surat dakwaan.

Perbedaan dengan penulisan ini adalah Barry Franky Siregar menekankan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis pengedar narkoba di kota Yogyakarta, sedangkan penulis menekankan pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkoba yang mengalami *Dual Diagnosis*.

Berbeda dengan karya-karya sebelumnya, penulis lebih menekankan pada perlindungan hukum apa yang sesuai terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yang mengalami *Dual Diagnosis* sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

F. Batasan konsep

1. Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.
2. Pelaku adalah seseorang orang yang melakukan suatu perbuatan.
3. Tindak pidana Narkotika adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.
4. *Dual Diagnosis* adalah dalam arti yang sempit memiliki arti bahwa seorang individu memiliki dua penyakit yang terpisah tetapi saling berkaitan yang terdiri dari diagnosis psikiatri (perubahan atau gangguan mental dan perilaku) dan diagnosis ketergantungan obat/zat yang dapat meliputi Narkotika.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan perbandingan pada Bahan Hukum Primer dengan Bahan Hukum Sekunder.

2. Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

b. Bahan hukum sekunder berupa, buku literature, hasil penelitian, artikel, jurnal ilmiah, wawancara, putusan pengadilan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier berupa, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, dan kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

4. Analisis

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif akan dilakukan, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

1) Deskripsi hukum positif merupakan peraturan perundang-undangan mengenai Pasal-Pasal yang terkait dengan bahan hukum primer mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berat ringannya disesuaikan masa tahanan pelaku.

2) Sistematisasi dilakukan secara vertikal dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat antinomi atau tidak. Berdasarkan sistemasi sudah ada sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3) Analisis

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karena sifatnya open sistem terbuka untuk dievaluasi atau dikaji.

4) Interpretasi

Sistematisasi secara gramatikal, yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum. Selain itu juga menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horisontal. Interpretasi teologi dipergunakan karena setiap norma mempunyai tujuan dan maksud tertentu.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, wawancara, dan putusan pengadilan yang akan dideskripsikan untuk mencari perbedaan dan persamaan.

5) Proses berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai pertimbangan Hakim dalam memutus pelaku tindak pidana narkoba yang mengalami *Dual Diagnosis*.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penelitian hukum untuk memberikan

pemahaman terhadap isi dari penelitian ini secara garis besar.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini, penulis memaparkan Tinjauan mengenai Putusan Pengadilan yang meliputi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana dan serta dasar-dasar hakim dalam memutus perkara pidana. Kedua, penulis memaparkan Tinjauan Umum mengenai tindak pidana Narkotika dan serta jenis-jenis tindak pidana Narkotika. Ketiga, penulis memaparkan pengertian mengenai *Dual Diagnosis*.

BAB III PENUTUP

Penutup, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang diteliti.